

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK DALAM MEMBANGUN KEPEMIMPINAN PETANI

IMPLEMENTATION PROGRAM OF CAPACITY BUILDING ON FARMER'S LEADERSHIP DEVELOPMENT

Surachman Suwardi

ABSTRACT

The objectives of this study were to know implementation program of capacity building on farmer's leadership development. The study object was reorientation of social system theory, communication theory, diffusion of innovation theory, and program of capacity building that have impact to the farmer's leadership. The study was carried out during 1 month on October 2018. The results of this study indicated 1). The election of farmer's group leader base on two criteria, what the leader must be and what the leader must do, 2). The implementation of capacity building program in a holistic approach and sustainable. The program facilitator are stakeholders, continuously, and facilitation by moduls, and 3). farmer's leadership is catalisator on capacity building program, have strong impact on group's dynamic

Keywords : *farmer's leadership, program of capacity building, criteria of leader*

PENDAHULUAN

Teori Sistem Sosial yang disampaikan oleh Talcott Parsons (Johnson, 1986) yang mengkaji sistem sosial dalam dua sudut pandang, yaitu sudut pandang struktural dan fungsional. Dalam sudut pandang struktural para aktor individual yang berinteraksi dapat berkembang menjadi struktur yang lebih luas, yaitu sosial dan budaya. Batas-batas sistem sosial tersebut adalah nilai-nilai atau unsur-unsur yang ada pada sistem sosial tersebut.

Adanya perubahan yang datang dari luar ataupun dari dalam suatu sistem, cenderung sistem itu mempertahankan stabilitasnya melalui empat fungsi yang memaksa, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola yang tersembunyi. Hal ini mengandung pengertian bahwa secara fungsional setiap sistem harus mampu menghadapi keempat fungsi tersebut.

Parsons mengistilahkan empat fungsi tersebut sebagai Kerangka AGIL. Pada dasarnya kerangka ini menunjukkan empat prasyarat fungsional yang harus dipenuhi oleh suatu sistem sosial. Kerangka tersebut terdiri dari komponen A, G, I dan L. A singkatan dari *Adaptation*, G

singkatan dari *Goal attainment*, I singkatan dari *Intergration* dan L singkatan dari *Latent pattern maintenance*.

Rusidi (1990) mencoba mempertegas teori sistem sosial yang dipelopori oleh Parsons dengan menghubungkan kerangka AGIL ke dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Keterkaitan kerangka AGIL tersebut merupakan strategi analisa fungsional yang dapat diterapkan pada sistem sosial tingkat mikro, *mezzo* atau makro. Kerangka tersebut menunjukkan pada kebutuhan setiap sistem sosial untuk memenuhi persyaratan fungsional.

Berfungsinya struktur status-status tersebut merupakan seperangkat peranan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian struktur sosial dan fungsi sosial berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Apabila struktur dan fungsi sosial tersebut berubah, maka akan terjadi perubahan sosial. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan perubahan tersebut ke arah yang bermanfaat.

Tindakan komunikasi dalam sistem pemberdayaan terhadap petani berakibat pada perubahan sosial. Rogers dan Shoemaker (1986) dan Roger dan Adhikarya (1978) membahas

perubahan sosial dari Teori Komunikasi, yaitu dari aspek difusi inovasi yang disempurnakan, yaitu pendekatan Model Komunikasi Konvergen.

Terdapat dua jenis perubahan sosial berdasarkan sumber terjadinya perubahan, yaitu pertama perubahan imanen, jika sumber perubahan berasal dari dalam sistem sosial. Kondisi ini terjadi jika anggota sistem sosial menciptakan dan mengembangkan ide baru dengan sedikit atau tanpa pengaruh sama sekali dari pihak luar dan kemudian ide baru itu menyebar ke seluruh sistem sosial. Kedua perubahan kontak, jika sumber ide baru berasal dari luar sistem sosial. Kondisi ini terjadi jika sumber dari luar sistem sosial memperkenalkan ide baru (antar sistem).

Berdasarkan datangnya kebutuhan untuk berubah, perubahan kontak terdiri dari perubahan kontak terarah dan perubahan kontak selektif. Perubahan kontak terarah atau perubahan terencana adalah perubahan yang disengaja dengan adanya orang luar atau sebagian anggota sistem yang bertindak sebagai agen pembaharu yang secara intensif berusaha memperkenalkan ide-ide baru tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh lembaga dari luar. Sedangkan perubahan kontak selektif terjadi jika anggota sistem sosial terbuka pada pengaruh dari luar dan menerima atau menolak ide baru dari luar.

Ditinjau dari sudut penerima ide-ide baru, Rogers dan Shoemaker (1986), mengklasifikasikannya ke dalam perubahan individual dan perubahan sistem. Perubahan pada tingkat individu dimana seseorang bertindak sebagai individu dalam sistem sosial yang menerima atau menolak inovasi. Perubahan pada tingkatan ini disebut dengan berbagai macam istilah antara lain, difusi, adopsi, modernisasi, akulturasi, belajar atau sosialisasi atau disebut juga sebagai perubahan mikro. Sedangkan perubahan pada tingkat sistem sosial sering diistilahkan sebagai pembangunan, sosialisasi, integrasi, adaptasi atau disebut juga sebagai perubahan makro.

Memperhatikan konsep-konsep komunikasi konvergen, maka proses pemberdayaan terhadap petani akan lebih efektif menggunakan model konvergen. Melalui sistem penyuluhan dengan pendekatan ini, akan diperoleh kesetaraan peran antara Penyuluh Pertanian sebagai komunikator dengan petani sebagai komunikan atau pembelajar.

Semua pemerintahan daerah, khususnya kabupaten sedang melaksanakan pembelajaran masyarakat agar kesejahteraannya meningkat, namun masih mengalami kegagalan khususnya dalam menumbuhkembangkan kelompok masyarakat. Kondisi ini disebabkan kurang lancarnya proses komunikasi antara fasilitator, yaitu Penyuluh Pertanian dan petugas dari instansi terkait dan petani binaannya sehingga tingkat adopsinya pada program penguatan kapasitas kelompok belum sesuai harapan

Menurut hasil penelitian BPS (2002) tentang studi dampak P4K (Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil), menyimpulkan antara lain bahwa peran ketua kelompok pada kegiatan di kelompok sangat kuat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap tingkat adopsi petani kecil dalam program penguatan kapasitas kelompok. Kepemimpinan kelompok menurut Rusidi (1989) meliputi dua aspek yaitu syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin kelompok (*what the leader must be*) dan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh pemimpin kelompok (*what the leader must do*).

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan dalam penulisan ini adalah sejauh mana implikasi hasil penelitian tentang kepemimpinan ketua kelompok hasil binaan Program P4K terhadap pengembangan kepemimpinan Ketua Kelompok Tani. Maksud penulisan adalah menganalisis dan menjelaskan implikasi hasil penelitian tentang kepemimpinan ketua kelompok hasil binaan Program P4K terhadap pengembangan kepemimpinan Ketua Kelompok Tani. Sedangkan tujuan penulisan adalah untuk mengetahui implikasi hasil penelitian tentang kepemimpinan ketua kelompok hasil binaan Program P4K terhadap pengembangan kepemimpinan Ketua Kelompok Tani.

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang difusi inovasi serta dapat mempunyai kegunaan praktis yang dapat digunakan dalam memecahkan persoalan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

PROGRAM P4K MEMBANGUN KEPEMIMPINAN PETANI

Penelitian pada Program P4K sangat strategis karena pertama, apabila program ini berhasil ditumbuhkembangkan, maka akan memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan karena sasaran P4K adalah petani miskin; kedua, program ini merupakan *long term project* (tiga fase, selama 23 tahun) yang memiliki metodologi yang telah berhasil melakukan pemberdayaan sosial ekonomi petani/nelayan; ketiga, metodologi yang diterapkan oleh P4K berdasarkan hasil kaji tindak dan terbukti berhasil dalam memberdayakan masyarakat miskin. Melalui metoda yang sejenis, India telah berhasil dalam dalam memberdayakan masyarakat miskin. Keempat, Program P4K berlanjut, metodologinya banyak dipakai dalam pemberdayaan kelompok, tidak sebatas proyek sehingga memungkinkan terbentuknya suatu sistem pendidikan masyarakat dalam mencari nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mangatos Tampubolon (2001) bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan 1) perlunya keberlanjutan pasca proyek 2) rencana tindak lanjut pasca proyek berupa kegiatan-kegiatan dan 3) fokus pemberdayaan adalah pendidikan untuk mencari nafkah sehingga memiliki potensi untuk menolong diri sendiri.

Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh V Puhazhendhi ; KJS Satyasai (2001); MS Kalkur (2001); dan R Das, RN Barman serta P.K Baruah (2001) menyimpulkan bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dengan pembelajaran penguatan kapasitas kelompok akan (1) mampu membangun kegiatan kelompok dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, (2) berhasil menumbuhkembangkan modal sosial anggota kelompok seperti sifat hemat, tekun dalam berusaha, kebiasaan menabung, menumbuhkan simpan pinjam, rasa percaya diri dan (3) program mampu menumbuhkembangkan kesetaraan jender.

P4K dibentuk oleh Badan Pengembangan SDM Pertanian pada tahun 1979 di enam propinsi dan pada tahun 1999 diperluas menjadi 18 propinsi, yaitu Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur /

Timor Timur dan Aceh, dan tersebar di 122 Kabupaten, 1.043 Kecamatan dan 6.552 Desa.

Pada tahun 2002, P4K telah mampu memfasilitasi 67.802 Kelompok Usaha Kecil (KUK). Selain itu 47.305 KUK telah memiliki tabungan di Bank sebanyak Rp 14,7 milyar dan 24.685 KUK mempunyai tabungan di kelompok senilai Rp 3,8 milyar. Dalam perjalanan sampai pada fase II, Propinsi Timor Timur terlepas dari binaan P4K karena telah menjadi negara sendiri, sehingga jangkauan wilayah binaan menurun menjadi 102 Kabupaten, 662 Kecamatan dan 3.857 Desa dengan melibatkan 213 Petugas Pembina tingkat Propinsi, 491 Petugas Pembina tingkat Kabupaten, 2.690 Penyuluh Pertanian (PP) dan Koordinator PP serta 76 *Account Officer* BRI (AO BRI).

Pada akhir tahun 2005, pengelolaan Program P4K dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelaksana Program P4K. Bupati berperan sebagai penanggungjawab program dibantu oleh seluruh stakeholders seperti dinas/instansi terkait dan BRI/lembaga keuangan lainnya. Dari sejumlah propinsi pelaksana Program P4K, Propinsi Jawa Barat merupakan propinsi yang memiliki kabupaten yang paling banyak dalam melanjutkan Program P4K, ada 18 kabupaten dari 20 kabupaten pelaksana Program P4K yang telah mendapat dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD pemerintah kabupaten (Badan Pengembangan SDM Pertanian, 2006).

Keberadaan Program P4K di Propinsi Jawa Barat telah memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian yang dilakukan Biro Pusat Statistik (2002) menyimpulkan bahwa Program P4K telah berhasil secara efektif dalam mengentaskan sejumlah besar rumah tangga dari kemiskinan. Hal yang sama telah dilakukan oleh Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat untuk lokasi Program P4K Propinsi Jawa Barat (Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat, 2005).

Sejalan dengan keberlanjutan pelaksanaan Program P4K di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang berhasil dalam melanjutkan Program P4K (Balai Besar Diklat Agribisnis Hortikultura, 2006). Kabupaten ini yang paling konsisten menerapkan metodologi P4K dalam memberdayakan petani kecil yang hidup di bawah garis kemiskinan. Komponen program pemberdayaan tersedia di Kabupaten

Sumedang, yaitu pertama adanya penumbuhkembangan kelompok swadaya, kedua adanya penguatan permodalan bagi kelompok, serta ketiga tersedianya manajemen/pelaksana Program P4K.

Program ini juga efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota Kelompok Usaha Kecil (BPS Jawa Barat, 2005). Hal ini juga ditunjukkan oleh hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang (2006) bahwa terdapat *trend* positif angka pendapatan rata-rata anggota kelompok per tahun sejak awal pembinaan (1986) sampai dengan tahun 2005.

Keberhasilan program tersebut khususnya dalam meningkatkan pendapatan anggota kelompok mengindikasikan bahwa P4K telah berhasil membangun kepemimpinan petani, yaitu kepemimpinan Ketua Kelompok. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Surachman Suwardi (2009) menyimpulkan bahwa 1). Tingkat kepemimpinan ketua kelompok status Tumbuh lebih baik dari status Pemula. Tingkat kepemimpinan rata-rata dalam kategori sedang, 2).Tingkat adopsi program penguatan kapasitas kelompok berstatus Tumbuh lebih baik dari Pemula, namun masih dalam kategori cukup atau pada tingkat legitimasi. 3).Tingkat kepemimpinan petani kecil pada kelompok status Tumbuh maupun Pemula berpengaruh terhadap tingkat adopsi program penguatan kapasitas kelompok.

Program penguatan kapasitas kelompok memiliki enam prinsip, yaitu (1) prinsip kepemimpinan dari mereka sendiri, yaitu pengurusan kelompok dipilih dari dan ditentukan oleh mereka sendiri; (2) prinsip partisipasi, dalam proses penguatan, para anggota kelompok diberi kesempatan untuk ikut serta secara aktif sehingga mereka lebih menyadari akan potensinya dalam menentukan hari depan yang lebih baik; (3) prinsip keswadayaan, dalam proses penguatan kelompok harus selalu diupayakan tumbuhnya kemampuan atau keswadayaan sehingga secara bertahap ketergantungan kepada pihak lain berkurang; (4) prinsip kesatuan keluarga, menuntut proses penguatan kapasitas kelompok untuk juga memperhatikan seluruh anggota keluarga petani kecil; (5) prinsip belajar menemukan sendiri (*discovery learning*), metode yang dipakai dalam seluruh rangkaian penguatan kapasitas kelompok harus dapat mendorong para petani kecil untuk belajar menemukan sendiri apa yang mereka kembangkan dalam rangka

peningkatan penghidupan dan kehidupan; (6) prinsip kemandirian, sejak awal proses penguatan kapasitas kelompok, para petani kecil sudah dimotivasi dan didampingi untuk mengembangkan kemampuan sehingga pada suatu saat mereka mampu lepas dari ketergantungan kepada pemerintah.

Langkah penguatan kapasitas kelompok dilakukan melalui tujuh kegiatan pokok, yaitu (1) mengenal potensi diri; (2) membangun cita-cita/harapan kelompok; 3) dinamika dan kerjasama kelompok; (4) kebiasaan menabung dan pengelolaan ekonomi rumah tangga; (5) pencatatan kelompok ; (6) pengembangan usaha kelompok ; dan (7) graduasi KPK.

IMPLIKASI BAGI PENGUATAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN KELOMPOK TANI

- 1) Diketahui kepemimpinan ketua kelompok menggambarkan tingkat kemampuan / kematangan sikap dan kematangan menggerakkan anggota kelompok, maka pemilihan ketua kelompok harus berdasarkan kepada dua kriteria, yaitu memenuhi persyaratan sebagai pemimpin dan kedua, mampu mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan oleh seorang pemimpin.
- 2) Rata-rata tingkat adopsi program penguatan kapasitas kelompok berbagai status pada kategori cukup atau pada tingkat legitimasi. Program penguatan kapasitas dilaksanakan secara holistik dan berkelanjutan. Holistik memberikan makna bahwa pembelajaran masyarakat harus melibatkan seluruh unsur pembina dari berbagai program secara sinergis. Kegiatan ini pendampingan dilaksanakan secara rutin. Materi pendampingan berbentuk modul yang disusun sesuai kebutuhan lapangan.
- 3) Diketahui tingkat kepemimpinan petani kecil pada kelompok status Tumbuh maupun Pemula berpengaruh terhadap tingkat adopsi program penguatan kapasitas kelompok, maka tingkat kepemimpinan merupakan dimensi penting dalam memperlancar pelaksanaan program penguatan kapasitas kelompok yang memiliki dampak terciptanya dinamika kelompok yang handal.

- 4) Persyaratan yang harus dimiliki oleh pemimpin kelompok adalah mempunyai daya tepaselira (*empathy*), kehadirannya diterima oleh anggota, menaruh perhatian pada anggota (*considerate*), luwes dan supel (*surgency*), memiliki perasaan yang stabil (*emotional stability*), beritikad menjadi pemimpin dan mengetahui peranan pimpinan, mempunyai kemampuan berpikir (*intelegence*), mampu mengambil keputusan (*competence*), bersikap tangguh (*consistence*), percaya kepada diri sendiri (*self confidence*) dan mampu membagi tugas kepeimpinannya. Sedangkan hal-hal yang harus dilakukan dalam memimpin kelompok adalah mempelajari alasan-alasan berkelompok (*philosophy implementation*), menganalisis dan memperjelas tujuan kelompok (*analyzing and goal identification*), membentuk struktur kelompok (*group structuring*), berinisiatif (berprakarsa), mencurahkan perhatian kepada tercapainya tujuan kelompok (*group goal achievement*), menyempurnakan fasilitas komunikasi (*improving communication facilities*), menjaga kekompakan anggota (*vascidity*), menciptakan kegairahan anggota (*sintality*) dan menjalankan tugas secara efektif (*hedonictone*).
- 5) Pelaksanaan penguatan kapasitas kelompok tani oleh penyuluh pertanian mengacu Peraturan Menteri Pertanian nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan SDM Pertanian. 2006. P4K Programme Completion Report. Jakarta : Badan Pengembangan SDM Pertanian, Departemen Pertanian.
- Balai Besar Diklat Agribisnis Hortikultura. 2006. P4K of West Java Completion Report. Lembang : Balai Besar Diklat Agribisnis Hortikultura.
- Biro Pusat Statistik (BPS). 2002. Studi Dampak P4K. BPS Pusat.
- Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Barat. 2005. Studi Dampak P4K Jawa Barat. BPS Propinsi Jawa Barat.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. University of South Florida.
- Kalkur, MS. 2001. Empowerment of Woman through NGOs : A Case Study of MYRADA Self-Help Groups at Chnichal : Project, Gulborga District, Karnaka Stall, India. Indian Journal of Agricultural Economics. July – September 2001; 56, 3; Pro Quest Agricultural Journals page 465 Working and Impact at Rural Self-Help Groups.
- Puhazhendhi V, KJS Satyasai. 2001. Economic and Social Empowerment at Rural Poor Through Self-Help Group. Indian Journal of Agricultural Economics. July - September 2001; 56, 3; Pro Quest Agriculture Journals page 450.
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- R. Das, R.N Barman and P.K. Baruah. 2001. Performance at Self Help Groups in Sonitpur District at Assam India. Indian Journal of Agricultural Economic. July - September 2001; 56, 3; Pro Quest Agricultural Journal page 466.
- Rogers, Everett M and Adhikarya, R. 1978. Communication and Inequitable Development : Narrow The Socio - Economic Benefit Gap. Media Asia.
- Rogers, Everett M dan Shoemaker, E. Floyd. 1986. Memasyarakatkan Ide-ide Baru. Surabaya : Usaha Nasional.
- Rusidi. 1989. Dinamika Kelompok Tani dalam Struktur Kekuasaan Masyarakat Desa serta Pengaruhnya terhadap Perilaku Usaha Tani Petani Berlahan Sempit dan Kekuatan Ikatan Patron-Klien (Suatu Survei di Jawa Barat). Disertasi. Bandung : Universitas Padjadjaran.
- _____. 1990. Dinamika Kelompok Tani. Fakultas Pertanian. UNPAD.
- Suwardi, Surachman. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adopsi Program Penguatan Kapasitas Kelompok Serta Dampaknya Terhadap Dinamika Kelompok Tani (Kasus Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil di Kabupaten Sumedang). Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.